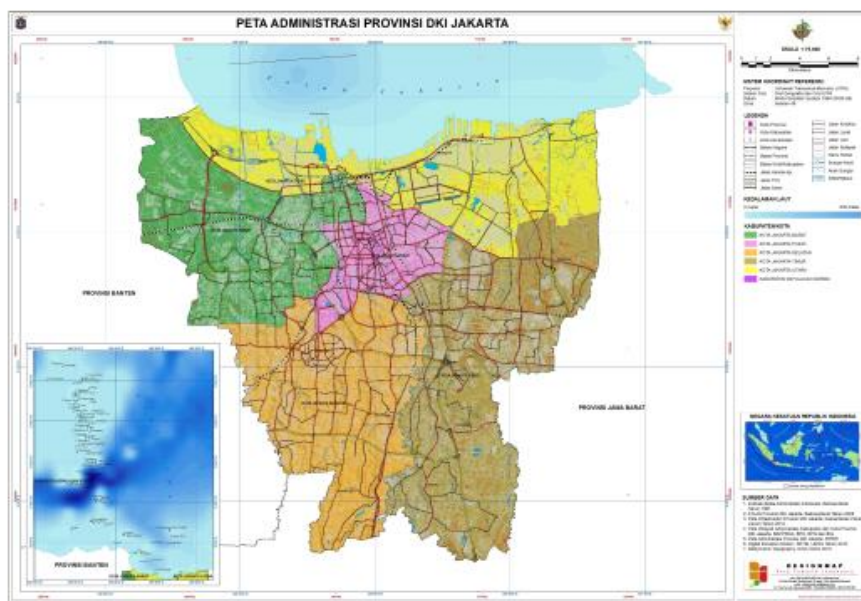


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Jakarta

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Jakarta



Sumber: petatematikindo.wordpress.com

Kota Jakarta, secara resmi dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Secara administratif, DKI Jakarta terdiri atas lima kota administratif dan satu kabupaten administratif, dengan total 44 kecamatan dan 268 kelurahan. Kelima kota administratif tersebut meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara,

Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan satu-satunya wilayah administratif non-kota.

Dari segi luas wilayah, DKI Jakarta memiliki total area sekitar 662,33 km², yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan laut. Wilayah daratan mencakup sekitar 473 km², sedangkan sisanya merupakan wilayah perairan yang cukup luas, terutama di kawasan Kepulauan Seribu.

Berdasarkan pembagian wilayah, Jakarta Timur merupakan kota dengan wilayah daratan terluas, yaitu sekitar 188,03 km², diikuti oleh Jakarta Utara dengan luas sekitar 146,66 km², Jakarta Selatan seluas 141,37 km², dan Jakarta Barat sekitar 129,54 km². Sementara itu, Jakarta Pusat merupakan wilayah terkecil dengan luas daratan sekitar 48,13 km². Adapun Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas daratan sekitar 8,70 km², namun memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas, menjadikannya kawasan dengan potensi ekologis dan pariwisata yang signifikan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Jakarta

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Jakarta Pusat	8	44	48,13 km ²
2	Jakarta Utara	6	35	146,66 km ²
3	Jakarta Barat	8	56	129,54 km ²
4	Jakarta Selatan	10	65	141,37 km ²
5	Jakarta Timur	10	65	188,03 km ²
6	Kepualauan Seribu	2	11	8,70 km ²

Total	44	276	662,33 km ²
-------	----	-----	------------------------

Sumber: Jakarta City Government

Kondisi topografi di wilayah DKI Jakarta sangat beragam, meskipun sebagian besar didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Wilayah Jakarta Utara serta sebagian Jakarta Barat merupakan daerah dengan kontur paling rendah dan berdekatan langsung dengan garis pantai, sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir dan intrusi air laut.

Sementara itu, wilayah Jakarta Selatan dan sebagian Jakarta Timur memiliki kontur yang relatif lebih tinggi dengan beberapa area berbukit kecil. Perbedaan elevasi ini berpengaruh terhadap pola aliran air dan potensi genangan di berbagai wilayah Jakarta.

Namun, kondisi dataran rendah tersebut juga memicu eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence) di beberapa kawasan. Fenomena ini memperburuk risiko banjir, khususnya di wilayah pesisir dan bantaran sungai.

Sebagai upaya mitigasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah strategis seperti pembangunan tanggul laut, normalisasi sungai, serta penggunaan pompa air untuk mengendalikan genangan dan mengurangi dampak banjir di kawasan rawan tersebut.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi geografis Jakarta terletak pada koordinat 6°12' hingga 6°28' Lintang Selatan dan 106°37' hingga 106°57' Bujur Timur. Secara geografis, Jakarta berada di pesisir barat laut Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara. Posisi tersebut menjadikan Jakarta sebagai wilayah yang strategis, baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun transportasi nasional. Namun, kondisi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, terutama banjir dan intrusi air laut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan penataan wilayah secara berkelanjutan pada tahun 2025. Sebagai pusat migrasi utama dari berbagai daerah di Indonesia, pembangunan infrastruktur transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.

2.1.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kota Jakarta mencerminkan dinamika perkotaan yang kompleks sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan nasional. Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 jumlah penduduk DKI Jakarta diperkirakan mencapai lebih dari 11 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan melebihi 15.000 jiwa per kilometer persegi.

Sebagian besar penduduk Jakarta tersebar di lima kota administratif dan satu kabupaten, dengan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Pertumbuhan penduduk di Jakarta lebih banyak disebabkan oleh arus migrasi dibandingkan kelahiran alami, seiring dengan tingginya tingkat urbanisasi. Kondisi ini menjadikan Jakarta sebagai kota dengan karakter masyarakat yang sangat heterogen, baik dari segi budaya, agama, maupun etnis. Penduduk asli Jakarta adalah suku Betawi, namun kota ini juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis lain seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Tionghoa, dan lainnya.

Secara demografis, mayoritas penduduk Jakarta berada pada kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Komposisi penduduk tersebut memberikan peluang dalam peningkatan produktivitas ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, akses pendidikan, serta pelayanan publik yang memadai. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk turut memberikan tekanan terhadap aspek lingkungan, ketersediaan perumahan, transportasi, serta infrastruktur perkotaan secara keseluruhan.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Jakarta Tahun 2025

No.	Kecamatan (Jiwa)	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2025
1	Jakarta Selatan	2.219.225,0	-0,07%
2	Jakarta Timur	3.085.058,0	0,33%
3	Jakarta Pusat	1.038.396,0	-.0,37%
4	Jakarta Barat	2.487.199,0	0,45%
5	Jakarta Utara	1.819.099,9	0,47%

6	Kepulauan Seribu	29,088,0	1,00%
---	------------------	----------	-------

Sumber: BPS Jakarta Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Jakarta diperkirakan akan melebihi 11 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya urbanisasi, arus migrasi dari wilayah lain, serta perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang pesat.

Sebagian besar penduduk Jakarta bermukim di lima kota administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta di Kabupaten Kepulauan Seribu. Tingginya jumlah penduduk ini menimbulkan berbagai tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan layanan publik, perumahan yang layak, sistem transportasi yang efisien, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, struktur demografis Jakarta yang didominasi oleh kelompok usia produktif memberikan potensi besar bagi kemajuan sosial dan ekonomi daerah. Namun demikian, potensi tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan akses terhadap fasilitas publik.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Jakarta

Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia, Jakarta memiliki visi pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keberlanjutan. Visi tersebut berbunyi:

“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan menekankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah misi strategis yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misi pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Prinsip good governance menjadi dasar utama dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan bebas dari praktik korupsi.

Selanjutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga melalui pengembangan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang merata. Upaya ini diiringi dengan pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berfokus pada penguatan ekonomi daerah melalui inovasi, kreativitas, serta pemanfaatan teknologi digital.

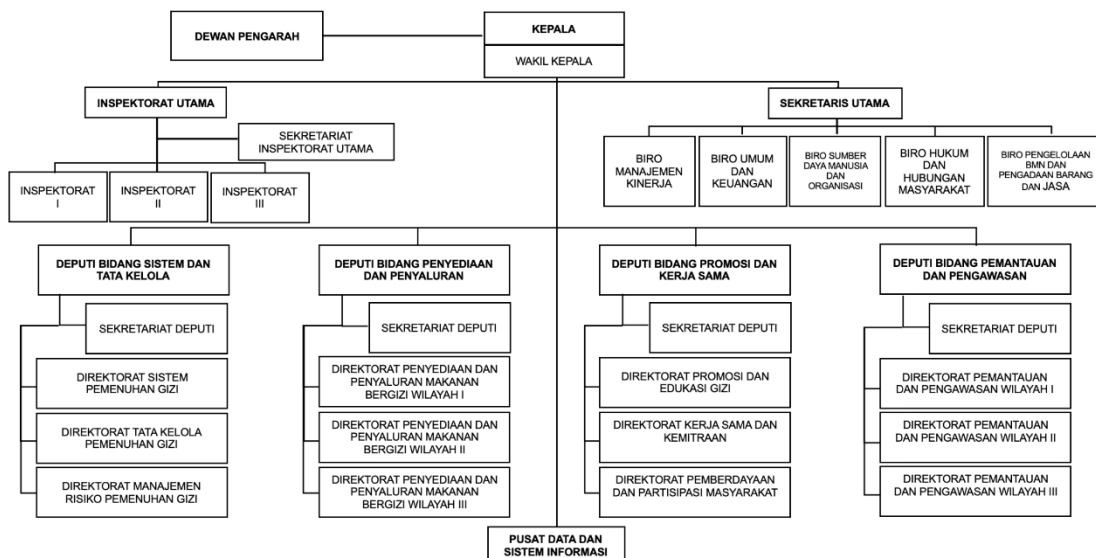
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan seimbang, sekaligus memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global yang modern dan berkelanjutan.

2.2 Badan Gizi Nasional

2.2.1 Struktur Organisasi Badan Gizi Nasional

Struktur organisasi Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Gizi Nasional. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam pembentukan lembaga tersebut serta mengatur secara umum mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Gizi Nasional. Selain itu, ketentuan ini juga menjadi dasar dalam penetapan struktur organisasi, yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Gizi Nasional



Sumber: Website Struktur Organisasi Badan Gizi Nasional

2.2.2 Gambaran Umum Badan Gizi Nasional

Saat ini, kantor Badan Gizi Nasional masih bersifat sementara, yaitu berlokasi di lantai 1 Gedung E, Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Gambar 2. 3 Peta Lokasi Sementara Badan Gizi Nasional



Sumber: Google Maps 2025

2.2.3 Visi dan Misi Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional memiliki visi untuk “Membangun Bangsa yang Lebih Sehat” melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi strategis yang saling berkesinambungan, yaitu :

1. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku makan sehat dan pola hidup sehat melalui kegiatan edukasi serta pemberdayaan masyarakat guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
2. Kedua, membangun sistem ketahanan gizi nasional yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pendekatan yang profesional.
3. Ketiga, mewujudkan tata kelola gizi yang adil, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Melalui visi dan misi tersebut, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk menjadi lembaga yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.